

Analisis Faktor Sistem Akuntansi Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Tual (Studi Kasus SKPD Kota Tual)

Refalina Alkatiri Puput^{1*}, Anik Malikah², Junaidi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: revalinapuput2@gmail.com

ABSTRACT

Government Agency Performance Accountability refers to the responsibility of a government entity to take ownership of both successful and unsuccessful implementation in its efforts to attain predefined objectives and goals. This accountability is manifested through regular government agency performance reports. In order to better understand how government entities are held accountable, the effects of regional accounting systems, internal control systems, and reporting systems will be examined in this study. The study questioned 82 individuals from a set of 15 Tual City-based SKPDs using a purposive sample methodology. Multiple linear regression analysis and a questionnaire were used to collect the data. The results of the F-test demonstrate that governmental entities' accountability is significantly influenced by the regional accounting system, internal controls, and reporting system. To assess the precise effects of each independent variable on the dependent variable, partial tests (t-tests) were performed. The findings of the study point to a considerable impact of the regional accounting system, internal controls, and reporting system on the performance accountability of governmental agencies.

Keywords: *Regional accounting system, internal control and reporting system, performance accountability of government agencies*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelayanan pemerintah daerah di Indonesia diatur oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kerangka hukum ini memiliki 2 konsekuensi yang relevan bagi pemerintah daerah. Pertama, desentralisasi politik dan keuangan memberi pemerintah daerah lebih banyak kebebasan untuk menentukan kebijakan, tujuan, program, dan kegiatan organisasi yang terkait dengan penyediaan pelayanan. Kedua, hal ini juga memberi pemerintah daerah lebih banyak kebebasan untuk mengakses, mengawasi, dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

Kinerja pemerintah menjadi perhatian publik karena masyarakat mulai mempertanyakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Performa aparatur pemerintah menentukan kinerja pemerintah ini. Dalam peran utamanya untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, aparatur pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang optimal dengan menggabungkan kemampuan bawahan dan pimpinan.

Selain itu, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mengurangi keperluan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem manajemen keuangan dan akuntansi keuangan mereka. Ini memiliki tingkat penting yang tinggi dalam memenuhi persyaratan akuntabilitas kepada publik dan memastikan transparansi dalam manajemen dana publik pemerintah daerah. Dipercaya jika akuntabilitas memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan pemerintah yang korup dan tidak dapat memberikan pelayanan publik secara efektif ke arah pemerintahan yang demokratis. Publik akan mendukung pemerintah yang akuntabel. Dipihak penyelenggara, akuntabilitas membuktikan jika pemerintah berkomitmen untuk melayani publik (Septiana, 2020).

Parameter keberhasilan telah dibuat dan ditetapkan untuk menakar kinerjanya semaksimal mungkin meskipun masih ada beberapa hambatan. Ada beberapa masalah dengan proses pengumpulan data kinerja. Selain keperluan untuk mengubah sistem data kinerja masing-masing SKPD, kekurangan sumber daya manusia untuk mengelola perubahan merupakan masalah tambahan. Jadi, untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Tual dan memenuhi kewajiban pertanggungjawaban amanah, sistem akuntabilitas yang kuat diperlukan. Akibatnya, untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang, pemerintah Kota Tual berusaha mengatasi masalah dan hambatan dengan mengambil tindakan pencegahan).

Berlandaskan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku, terdapat masalah dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kota Tual Tahun Anggaran 2022, yang meliputi 12 LHP LKPD, 7 LHP Kinerja, dan 2 LHP DTT dalam audit laporan. Laporan tidak dikirim dengan waktu yang tepat, laporan tidak disusun dengan benar, atau sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan pemerintah Kota Tual dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan bagaimana laporan tersebut disajikan.

Berlandaskan uraian tersebut, maka peneliti menjalankan studi dengan judul **“Analisis Faktor Sistem Akuntansi Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Accountability Theory*

AS Amelia, (2015). Mengemukakan akuntabilitas mengindikasikan jika pihak yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas nama pemberi wewenang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini dicapai melalui pembagian kekuasaan di antara berbagai lembaga pemerintah.

2. Sistem Akuntansi Daerah

Herawaty, (2014). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berfungsi untuk memastikan pelaksanaan APBD dengan mengumpulkan data, mencatat, menggabungkan data, dan mengirimkan laporan keuangan. Semua proses ini bisa dilakukan secara manual atau dengan memakai aplikasi komputer. Parameter sistem akuntansi daerah :

- 1) Pencatatan
- 2) Pengikhtisaran
- 3) Pelaporan

3. Regulasi Intern

Menurut Widaryanti dan Pancawardani, (2020). Regulasi intern tidak hanya berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan menilai sumber daya sebuah organisasi; itu juga merupakan sistem yang mencakup struktur organisasi dan semua aturan dan prosedur yang digunakan bersama untuk melindungi kekayaan dan aset organisasi secara keseluruhan.

Dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa di bawah ini ialah parameter dari regulasi internal:

- 1) Konteks kendali
- 2) Evaluasi potensi bahaya
- 3) Kegiatan regulasi
- 4) Sistem komunikasi
- 5) Peninjauan

4. Sistem Pelaporan

Menurut Yogi (2019). Sistem pelaporan yang efektif diperlukan untuk mendeteksi dan mengawasi pemakaian anggaran yang telah ditetapkan. Sistem ini juga harus membuktikan bagaimana tingkat pertanggungjawaban dari bawahan ke atasannya bervariasi. Akuntabilitas sektor publik didasarkan pada laporan keuangan sektor publik. Laporan

keuangan membantu pengambilan keputusan dan melaksanakan akuntabilitas sektor publik. Tujuan utama akuntansi sektor publik bukan hanya membuat laporan keuangan. Setelah memahami cara kerja sistem pelaporan, parameter berikut dibuat:

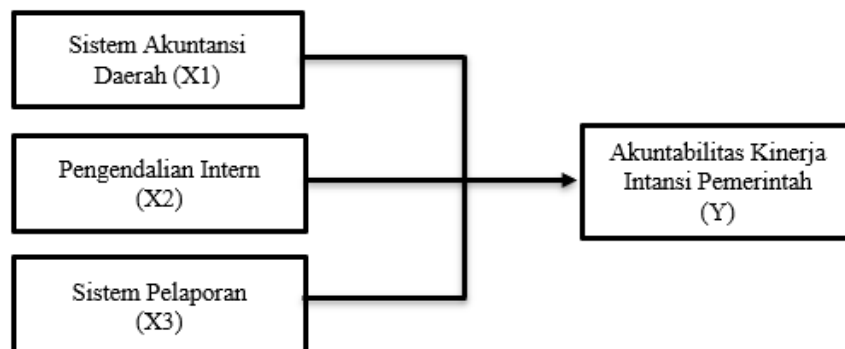
- 1) Kewenangan
- 2) Manajemen
- 3) Kewajaran
- 4) Keseimbangan antar generasi
- 5) Tinjauan performa

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Apriliani, (2022). Kinerja lembaga pemerintah yang unggul menandakan jika mereka memiliki tanggung jawab terhadap berhasil atau gagalnya pelaksanaan misi organisasi mereka. Ini dilakukan dengan memastikan jika orang yang bertanggung jawab melakukan hal yang benar. Parameter Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah ialah sebagai berikut :

- 1) Efisiensi
- 2) Efektivitas
- 3) Hasil

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1: Sistem Akuntansi Daerah (X1), Regulasi Intern (X2) dan Sistem Pelaporan (X3) berdampak secara relevan pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah di Kota Tual.
- H1_a: Sistem Akuntansi Daerah (X1) berdampak secara relevan pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah di Kota Tual.
- H1_b: Regulasi Intern (X2) berdampak secara relevan pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah di Kota Tual.
- H1_c: Sistem Pelaporan (X3) berdampak secara relevan pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah di Kota Tual.

METODOLOGI PENELITIAN

Riset eksplanatori ini memakai pendekatan kuantitatif. Di antara 15 satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kota Tual ialah Badan Perencanaan Pembangunan, Badan Kepegawaian, Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Regulasi Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Penanggulangan Bencana, Perdagangan dan Perindustrian, Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan Kependudukan. Studi dimulai pada 2022 dan berakhir pada 2022.

Populasi dan Sampel

Riset ini memanfaatkan populasi yang mencakup 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tual. *Purposive sampling* ialah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada beberapa standar.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang dipakai ialah data primer serta teknik untuk mengumpulkan data berupa penyebaran kuesioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Akuntansi Daerah	82	2	5	52,40	5,045
Regulasi Intern	82	1	5	57,06	7,796
Sistem Pelaporan	82	3	5	21,74	2,249
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82	3	5	13,34	1,229
Valid N (listwise)	82				

Berlandaskan tabel 1 diketahui jumlah sampel data sebanyak 82 responden yang diambil dari 15 SKPD di Kota Tual. Dapat dijelaskan dari hasil analisis deskriptif sebagai berikut:

1. Variabel Sistem Akuntansi Daerah (X1) sebagai variabel independen pada tabel 4.7 membuktikan nilai min. 2, nilai max. 5 dan mean senilai 52,40 serta standar deviasi senilai 5,045.
2. Variabel Regulasi Intern (X2) sebagai variabel independen pada tabel 4.7 membuktikan nilai min. 1, nilai max. 5 dan mean senilai 57,06 serta standar deviasi senilai 7,796
3. Variabel Sistem Pelaporan Daerah (X3) sebagai variabel independen pada tabel 4.7 membuktikan nilai min. 3, nilai max. 5 dan mean senilai 21,74 serta standar deviasi senilai 2,249.
4. Variabel Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (Y) sebagai variabel dependen pada tabel 4.7 membuktikan nilai min. 3, nilai max. 5 dan mean senilai 13,34 serta standar deviasi senilai 1,229.

Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas membuktikan jika 34 pernyataan valid. Nilai pernyataan pada masing-masing instrumen $> r$ tabel (0,214).

2. Uji Reliabilitas

Empat komponen yang bisa diandalkan pada pengujian reliabilitas membuktikan setiap variabel memiliki koefisien *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Uji Normalitas

Karena nilai Asymp.Sig melebihi 0,05, maka bisa disimpulkan dari hasil uji normalitas bahwa distribusi *Kolmogorov-Smirnov* ialah normal.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinieritas riset membuktikan jika tidak ada bukti multikolinieritas antara variabel independen; setiap variabel independen memiliki nilai faktor variasi inflasi (VIF) < 10 dan nilai toleransi $> 0,1$.

2. Uji Heteroskedastisitas

Di *scatterplot*, titik tersebar secara acak dan merata di sekitar angka 0 pada sumbu Y, baik di atas maupun di bawahnya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan jika model regresi ini tidak menunjukkan bukti heteroskedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.463	2.028		4.854	0.009
X1	0.399	0.104	0.467	3.842	0.000
X2	0.175	0.105	0.200	1.657	0.102
X3	0.124	0.134	0.095	0,927	0.357

Setelah dilakukan Analisis didapat persamaan regresi :

$$Y = 5.463 + 0,399 X1 + 0,175 X2 + 0,124 X3 + e$$

Sig 0,000 Sig 0,102 Sig 0,357

Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (F)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	176.366	4	59.789	22.890	.000 ^b
	Residual	200.329	78	2.568		
	Total	376.695	82			

Semua variabel X berdampak positif pada variabel Y jika diuji secara bersamaan, dengan F hitung 22,890 dan relevan 0, 000, yang berarti $< 0,05$.

b. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.684 ^a	0.468	0.448	1.60260	

Diketahui jika (X1), (X2), dan (X3) berdampak secara bersamaan pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah dengan nilai *Adjusted R Square* 0,448, atau 44,8%. Selain itu, variabel lain yang tidak diteliti, berdampak pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah.

c. Uji Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.463	2.028		2.694	0.009
	X1	0.399	0.104	0.467	3.842	0.001
	X2	0.367	0.105	0.429	3.940	0.000
	X3	0.600	0.124	0.613	4.852	0.000

1. Variabel Sistem Akuntansi Daerah (X1) memiliki t hitung senilai 3,842 dengan relevansi $0,001 < 0,05$, maka Sistem Akuntansi Daerah (X1) berdampak positif pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (Y).
2. Variabel Regulasi Intern (X2) memiliki t hitung senilai 3,940 dengan relevansi $0,000 < 0,05$, maka Regulasi Intern (X2) berdampak positif pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (Y).
3. Variabel Sistem Pelaporan (X3) memiliki t hitung senilai 4,852 dengan relevansi $0,000 < 0,05$, maka Sistem Pelaporan (X3) berdampak positif pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Sistem Akuntansi Daerah (X1), Regulasi Intern (X2), Sistem Pelaporan (X3) berdampak secara relevan pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (Y) di SKPD Kota Tual.
2. Sistem Akuntansi Daerah (X1) berdampak secara relevan pada Akuntabilitas Kinerja

Lembaga Pemerintah (Y) di SKPD Kota Tual.

3. Regulasi Intern (X2) berdampak secara relevan pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (Y) di SKPD Kota Tual.
4. Sistem Pelaporan (X3) berdampak secara relevan pada Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (Y) di SKPD Kota Tual.

Saran

1. Riset selanjutnya harus memakai metode wawancara langsung sebagai alat pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan berkualitas.
2. Diharapkan jika riset mendatang akan mempelajari faktor lain yang berdampak pada tanggung jawab lembaga pemerintah atas kinerjanya, seperti pengawasan fungsional dan motivasi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Sukma. 2022. *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Regulasi Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Probolinggo*. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Jember.
- AS Amelia. 2015. *“The Influence of Internal Control, Accountability, External Pressure and Leader Commitment on Transparency of Financial Reporting”*. Faculty of Economics Riau University. Jurnal FEKON. Vol. 2 No. 2 oktober 2015.
- Febrianti, Feblin, Aini. 2019. *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu”*. Journal of Management and Bussines (JOMB). Vol. 1, No. 2
- Hendrianto, Alamsyah, Indrawan, 2022. *“Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Regulasi Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah”*. Vol XIX, No 2
- Herawaty. 2014. *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Regulasi Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi”*. Jurnal Riset Universitas Jambi Seri Humanior. Vol. 13, No. 2, Hal. 31-36.
- Septiana. 2020. *“Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Regulasi Intern, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi”*. Fakultas Ekonomi Universitas Widya Dharma.
- Sukraini, 2023. *“Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Regulasi Intern Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah”*. Jurnal JUMBO. Vol. 7, No. 2, hal. 327-333
- Widaryanti, Pancawardani. 2020. *“Analisis Pengaruh Regulasi Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*. Jurnal Ilmiah Ekonomi. Vol. 15, No. 2, 477-492.
- Yogi, Suharno, and Bambang W. 2019. *“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Regulasi Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15, 489-501
- Zulkarnain, Safiri. 2021. *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 9, No.2.